



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTUTI SAKDIYAH

Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH

3. NHK : **971889**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.400.000.00
A. TANAIT DAN BANGONAN		1.400.000.0

 Tanah dan Bangunan Seluas 1.545 m2/84 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

 MOBIL, TOYOYA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000,000

 MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

3. MOTOR, H<mark>O</mark>NDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK	LAINNYA	Kar	Kar	Rp.	CAN CAN
D. SURAT BERHARGA				Rp.	
E. KAS DAN SETARA	KAS	JOK-	NOK-	Rp.	2.200.000
F. HARTA LAINNYA				Rp.	W.
Sub Total	L 16	al.	al.	Rp.	1.539.200.000
III. HUTANG		Rp.	Kar Kar		
IV. TOTAL HARTA KEKAYA	AN (II-III)			Rp.	1.539.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara





Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

